



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Rencana kinerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif atau membangun sangat diharapkan dari Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN Republik Indonesia untuk kesempurnaan agar lebih baik dimasa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 ini diucapkan terima kasih.

Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkah, atas usaha kita semua.

Samarinda, 26 Januari 2024

**Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Timur**



Dedi Agustono, S.I.K.,M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan.

Focal point penanggulangan Narkotika di wilayah Kalimantan Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Timur melalui Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan serta meningkatkan kerjasama baik pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah(OPD), lembaga dan kementerian serta swasta.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Kalimantan Timur adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Adanya refocusing anggaran sehingga membatasi kegiatan berskala besar yang bisa dilaksanakan untuk kegiatan kampanye maupun informasi dan edukasi lainnya.
- b. Kegiatan penyampaian informasi secara virtual baik dari BNN maupun BNN Provinsi dirasa kurang maksimal, karena keterbatasan ataupun ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan (seperti jaringan internet yang kurang baik).
- c. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang sulit, seperti banyaknya perbukitan sungai dan laut.
- d. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan banyaknya daerah terpencil.
- e. Kurangnya pegawai/personil baik di BNNP maupun BNNK jajaran.
- f. Tidak memiliki transportasi air baik berupa kapal maupun speedboat.

2. Hasil Evaluasi

BNNP Kaltim membawahi 3 (tiga) BNNK yaitu BNNK Samarinda, BNNK Balikpapan serta BNNK Bontang. Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Timur

terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Sehingga masih terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang belum terbentuk BNNK. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan program P4GN oleh BNNP Kaltim menjadi kurang maksimal, mengingat luas wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur dan yang mencapai 127.346,92 km² dan luas wilayah lautan 25.656 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 3,752.605 jiwa (52% laki-laki; 48% wanita) dengan kelompok usia terbanyak adalah usia 30 -34 tahun dan 0 – 9 tahun. Selain itu letak geografis Provinsi Kalimantan Timur, dimana bagian utara berbatasan dengan Provinsi Kaltara; bagian timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi; bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalsel; serta bagian Barat berbatasan dengan Kalbar, Kalteng dan juga berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia mempunyai banyak akses/pintu masuk yang menjadikannya sangat rawan penyeludupan dan peredaran gelap narkoba.

Pada tahun 2018 jumlah Laporan Kasus Narkotika (LKN) dilingkungan BNNP dan jajaran sebanyak 86 kasus, pada tahun 2019 jumlah LKN sebanyak 72 kasus, tahun 2020 sebanyak 52 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 35 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 26 Kasus..

Untuk jumlah tersangka diperoleh bahwa pada tahun 2018 jumlah tersangka kasus narkotika dilingkungan BNNP dan jajaran sebanyak 128 orang, pada tahun 2019 jumlah tersangka sebanyak 103 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 65 orang, 54 orang pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 sebanyak 47 Orang.

Adapun data jumlah barang bukti BNNP Kaltim dan jajaran dari tahun 2022 yaitu sebagai berikut yaitu untuk shabu sebanyak 5,306,2 gr, ganja 8.558,68 gr, liquid ganja 12,7 ml serta tembakau gorilla 11,96 gr.

Berdasarkan hasil survei BNN bekerjasama LIPI dan grafik diatas dengan sasaran survei pekerja, pelajar dan ibu rumah tangga, diperoleh bahwa pada tahun 2014, provinsi Kalimantan Timur berada diposisi ke -2 (nilai 3,07%) dari 34 provinsi data prevalensi penyalahgunaan narkotika, hal ini diatas rata-rata prevalensi nasional (nilai 2,18 %). Demikian pula pada tahun 2017, provinsi Kaltim masih menduduki urutan ke-atas yaitu urutan ke-3 (nilai 1,77%) dari 34 provinsi dan juga diatas rata-rata angka prevalensi nasional (nilai 2,1%). Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan, provinsi Kaltim menduduki urutan ke 33 (nilai 0,1%) dari 34 provinsi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika (nilai 1,8%). Hal ini disebabkan hasil kerjasama yang kuat antara BNNP, Polda dan Pemerintah Daerah wilayah Kalimantan Timur. Dan pada tahun 2021 angka

prevalensi penyalahgunaan narkoba terjadi kenaikan untuk skala nasional yaitu sebesar 1,95%.

Untuk angka prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk kategori pernah pakai semasa hidup pada tahun 2019 diperoleh sebesar 0,5% atau sebanyak 16.963 orang, berada di urutan yang ke 26 dari 28 provinsi se Indonesia Adapun dari segi usia pertama kali menggunakan narkoba secara nasional berkisar antara umur 17 – 19 tahun, sedangkan untuk kewilayahan Kalimantan Timur berkisar di umur 13 – 18 tahun . Untuk kategori pengguna narkoba secara nasional terbanyak berada pada kisaran usia produktif 35 – 44 tahun, hal ini sesuai/relevan dengan data berdasarkan jenis pekerjaan untuk kewilayahan Kalimantan Timur terbesar dilingkungan swasta (59%, data tahun 2021).

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
7. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional;
8. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkoba Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai berikut.

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN PENDANAAN |
|----|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 3 Kabupaten Kota | Rp 383.000.000 |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 3 Kabupaten Kota | Rp 438.700.000 |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi | 3 Kabupaten Kota | Rp 824.382.000 |
| 4. | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | 1 Kawasan | Rp 90.000.000 |
| | | | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *) | 2,8 Indeks | |
| 5. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | 10 Orang | Rp 97.970.000 |
| | | | Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | 8 Orang | |
| 6. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi | 1 Lembaga | Rp 690.707.000 |
| | | | Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat | 8 Unit | |
| 7. | Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika | Indeks Kepuasan Penerima LayananRehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN | 3,42 Indeks | Rp. 56.060.000 |
| | | Meningkatnya upayapemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika | Persentase penyalahguna dan/atau pecandunarkotika yangmengalami peningkatan kualitas hidup | 68 % | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 8. | Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi | Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika | Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*) | 3 Laporan | Rp 150.000.000 |
| 9. | Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | 15 Berkas Perkara | Rp 820.000.000 |
| 10. | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan | 100 Indeks | Rp 278.745.000 |
| | | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika | 100 Indeks | |
| 11. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran | 91 Indeks | Rp 62.277.0000 |
| | | | Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | 3 Kab/kota | |
| | | Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal | Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal | 78 Indeks | |
| 12. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP | 98,95 Indeks | Rp 9.877.122.000 |
| | | | Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | 3 Kab/Kota | |
| Total Anggaran BNNP dan BNNK Jajaran | | | | | Rp 13.818.963.000 |

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi, perhitungan dibuat disesuaikan dengan Sebaran Anggaran di Tahun 2024.*

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Kalimantan Timur, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran 1
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan BNNK Jajaran
Tahun 2024

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | RENCANA VOLUME |
|-----------|--|---|---|-----------------------|
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i> | 2 Lembaga |
| | | | Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk | 30 Orang |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba | 20 |
| | | | Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa | 8 Desa |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi | Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba | 8 Lembaga |
| 4. | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | 1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *) | Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika | 1 Kawasan |
| 5 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi | 40 Orang |

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | RENCANA VOLUME |
|-----------|---|---|--|-----------------------|
| 6. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | 1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP 3. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi | Lembaga rehabilitasi yang operasional | 4 Lembaga |
| | | | Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 3 Lembaga |
| | | | Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional | 8 Lembaga |
| 7. | Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi | Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*) | Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | 3 Laporan |
| 8. | Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika | 15 Kasus |
| 9. | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika | Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika | 2 Produk |
| | | | Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU | 21 Orang |
| | | | Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit vertikal) | 47 Orang |
| 10. | | 1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP (91 Indeks) | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 8 Dokumen |

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | RENCANA VOLUME |
|-----|--|---|---|-------------------|
| | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target (3 Kab/kota) | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 8 Dokumen |
| 11. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP (98,95 indeks) 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target (3 Kab/Kota) | Layanan Manajemen Keuangan | 8 Dokumen |
| | | | Layanan Perkantoran | 12 Layanan |

Lampiran 2
Matrik Rincian Pagu KRO
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan BNNK Jajaran
Tahun 2024

| NO | Kode | KEGIATAN | KALTIM | BALIKPAPAN | SAMARINDA | BONTANG | TOTAL |
|-----------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 8.257.544.000 | 2.049.477.000 | 1.931.456.000 | 1.580.486.000 | 13.818.963.000 |
| 1 | 3236 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | 2.789.503.000 | 90.736.000 | 86.684.000 | 89.892.000 | 3.056.815.000 |
| 2 | 3237 | Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | 31.000.000 | 11.680.000 | 11.680.000 | 11.180.000 | 65.540.000 |
| 3 | 3238 | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | 24.846.000 | 15.715.000 | 5.701.000 | 16.015.000 | 62.277.000 |
| 4 | 3239 | Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 3.285.939.000 | 1.322.248.000 | 1.233.923.000 | 912.657.000 | 6.754.767.000 |
| 5 | 3247 | Penyelenggaraan Advokasi | 120.700.000 | 106.000.000 | 106.000.000 | 106.000.000 | 438.700.000 |
| 6 | 3248 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 |
| 7 | 3251 | Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 |
| 8 | 3256 | Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba | 31.465.000 | 7.065.000 | 10.465.000 | 7.065.000 | 56.060.000 |
| 9 | 3257 | Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | 247.002.000 | 192.460.000 | 192.460.000 | 192.460.000 | 824.382.000 |
| 10 | 3258 | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | 205.920.000 | 49.225.000 | 23.600.000 | 0 | 278.745.000 |
| 11 | 3259 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | 53.030.000 | 14.980.000 | 14.980.000 | 14.980.000 | 97.970.000 |
| 12 | 3260 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | 325.139.000 | 119.368.000 | 130.963.000 | 115.237.000 | 690.707.000 |
| 13 | 3979 | Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| 14 | 5354 | Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | 700.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 820.000.000 |
| 15 | 5936 | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | 183.000.000 | 70.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 383.000.000 |
| P4GN | | | 2.106.256.000 | 599.098.000 | 583.468.000 | 540.742.000 | 3.829.564.000 |
| DUKJEMEN | | | 6.151.288.000 | 1.450.379.000 | 1.347.988.000 | 1.039.744.000 | 9.989.399.000 |



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JL. RPAK INDAH KM. 1 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG SAMARINDA 75126
TELP./FAX. (0541) 6276879
E-MAIL : BNNP.KALIMANTANTIMUR@GMAIL.COM
WEBSITE : KALTIM.BNN.GO.ID